

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat dan bernegara kekuasaan muncul sebagai suatu fenomena sosial yang menggiurkan, mempesona tapi sekaligus mengerikan. Dalam percaturan politik kekuasaan selalu berhubungan dengan, dan sering hanya semata-mata ditujukan untuk meraih, apa yang oleh orang Jawa disebut kamukten atau kejayaan.

Manusia diciptakan dengan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Ia dikaruniai kemampuan yang sangat istimewa, yaitu kemampuan akal pikir yang membedakannya dari binatang. Sudah sepantasnya akal pikir ini beriman kepada Khaliknya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta.

Hubungan fungsional antara Islam dan politik sering tidak dimengerti dengan baik oleh sementara kaum muslimin sehingga banyak menganggap bahwa kegiatan politik itu berdiri sendiri, terpisah sama sekali dari Islam. Bahkan dalam masyarakat kita ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik. Seolah-olah politik itu mengandung kelicikan, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan dan konotasi buruk lainnya. (Rais, 1993 : 23).

Persepsi politik seperti ini tentu cukup berbahaya, ditinjau dari kaca mata dakwah, pandangan politik seperti ini sangat merugikan. Al-Qur'an secara imperatif menyuruh setiap muslim untuk menyeru umat manusia ke jalan Tuhan dengan bijaksana, nasehat yang baik dan argumentasi yang jitu (QS. An-Nahl : 125). Ayat ini menunjukkan kita cara-cara yang baik untuk mengajak hamba-hamba Allah ke jalan-Nya dan tidak ada sedikitpun konotasi bahwa dakwah fi sabilillah di anjurkan lewat paksaan, apalagi dengan kekerasan. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa setiap muslim pada hakekatnya berkewajiban melakukan dakwah supaya kebenaran agama yang telah ia terima dapat dinikmati orang lain. Kebenaran Islam tidak hanya bersifat teoritis melainkan juga bersifat aksiologis dan praktis. Kebenaran inilah yang harus ditularkan

seluas-luasnya kepada masyarakat dengan sikap dan pandangan yang bijak, nasehat yang indah dan argumentasi yang kokoh.

Kegiatan dakwah dalam Islam sesungguhnya meliputi semua dimensi kehidupan manusia, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar juga menggunakan seluruh jalur kehidupan. Dengan demikian, kegiatan budaya, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain dapat dijadikan kegiatan dakwah, baik dakwah Islamiyah maupun dakwah Jahiliyah. Dari pemahaman seperti mudah kita mengerti bahwa politik pada hakekatnya merupakan bagian dari dakwah. Adapun dakwah Islam adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang Islami. Oleh karena itu dakwah juga berarti Islamisasi seluruh kehidupan manusia. (Rais, 1993 : 23).

Kondisi Mesir pada abad kesembilan belas, baik politik maupun ekonominya terkait erat dengan Eropa. Penetrasi finansial dan perdagangan asing terjadi dimana-mana dan kehadiran mereka yang semakin luas di Mesir menyebabkan penguasa dan orang kaya negeri ini berperilaku seperti orang Eropa. Dimensi kultur imperialisme ini melukai kepekaan Mesir dan memupuk sentimen anti Eropa serta keinginan menyingkirkan pengaruh asing.

Inggris mendirikan rezim politik di Mesir dengan

tatanan Eropa. Berlanjutnya peran Inggris dalam politik menyebabkan kepentingan asing tetap dominan dalam ekonomi Mesir. Hubungan ekonomi Mesir ditandai dengan kesenjangan ekonomi yang menyolok.

Masyarakat Mesir mengalami perubahan pentingnya pada dasawarsa pertama abad dua puluh. Perbaikan gizi masyarakat ikut berperan penting dalam pertumbuhan penduduk. Berbagai kota menyaksikan selain penambahan jumlah, juga perubahan watak kearah suatu masyarakat yang semakin kompleks. (Rahbini, 1994 : 128).

Rakyat Mesir waktu itu sudah jauh dari citra Islam dan melupakan Islam sebagai jalan hidupnya, baik masalah sosial, ekonomi, politik maupun militer. Hukum Mesir, baik konstitusi maupun sistem pemerintahannya adalah ala barat yaitu sikap dan pandangannya. Intinya Mesir telah menjadi negara sukuler. (Esposito, 1990 : 176)

Dalam kondisi yang demikian itu Hasan Al-Banna lahir sebagai intelektual muslim yang tergerak hatinya untuk memperbaiki realitas sosial yang sudah kehilangan dimensi spiritual dan mengabaikan pesan-pesan Ilahi. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Dia lahir di Mahmudiah, kota kecil yang terletak disebelah timur laut kota Kairo pada tahun 1906. Ayahnya Syeh Ahmad Abdurrahman Al-

Banna, selain tukang reparasi jam juga ulama' yang pernah belajar sebagai mahasiswa di Al-Azhar pada waktu Muhammad Abduh masih mengajar di lembaga itu. Maka dari ayahnya, Hasan waktu kecil tidak hanya mendapatkan pelajaran agama saja tapi juga gagasan-gagasan pembaharuan (Syadzali, 1993 : 147).

Pada usia dua belas tahun Banna masuk sekolah dasar negeri. Dia juga masuk sebuah kelompok Islam, sebuah himpunan perilaku bermoral, dimana anggotanya wajib mengikuti moralitas Islam dengan seksama.

Banna juga bergabung dengan Tarekat Hasafiyah. Tarekat berwawasan syari'at ini menarik dirinya karena berpegang pada kitab suci dalam ritual dan upacaranya. Banna merasa betapa penting hubungan antara pemimpin dan pengikutnya.

Pada tahun 1923, Banna pergi ke Kairo dan masuk Dar Al-Ulum sekolah tinggi guru Mesir. Selama lima tahun di Kairo dia menyaksikan iklim politik yang hidup, dimana dua partai politiknya selalu cekcok, bahkan yang lebih penting adalah dia langsung mengalami westernisasi kultural Mesir yang dia samakan dengan atheisme dan ketidak bermoralan.

Melihat kondisi negerinya yang demikian, Banna mempunyai gagasan untuk program aksi, yaitu melibatkan pembentukan organisasi yang akan mengilhami

kebangkitan Islam. Maka pada bulan Maret 1928 Banna bersama ulama' yang lain mendirikan "***Ikhwanul Muslimin***", yang bertujuan mempromosikan Islam sejati dan meluncurkan perjuangan melawan dominasi asing.

Pada tahun 1932 setelah dipindahkan ke Kairo, Ikhwanul Muslimin siap menjadi gerakan nasional. Ukuran dan pengaruh Ikhwan maupun misi publik ambisiusnya membawa Banna terlibat dalam politik nasional. Bahkan pada tahun 1936 dia meminta para penguasa Arab untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam. Selanjutnya Banna menyeru kepada para raja untuk memebubarkan partai-partai politik di Mesir, karena mereka korupsi dan berdampak memecah belah negara.

Menurut Banna solusi untuk berbagai problem politik ekonomi dan budaya Mesir terletak pada gerakan kembali kepada Islam, yang merupakan tatanan yang lengkap bagi semua segi eksistensi manusia. Dia percaya bahwa Islam juga menggariskan perilaku manusia dalam kehidupan keseharian.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Kemudian dia menguraikan lebih rinci mengenai fungsi negara Islam dan prinsip dasarnya. Dia menegaskan bahwa prinsip Islam dapat diterapkan pada keyakinan yang banyak dianut dalam soal politik dan lembaga politik.

Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 Mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru missile sekarang membuat jarak 3 Mil tidak ada artinya. Oleh karena itu beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 Mil. Di samping itu kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain dilepas pantai, atau yang dinamakan "landas benua" (continental shelf) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang jauh lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 Mil sebagai "economic zone" agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis

lainnya.

2. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.

3. Pemerintah. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk Undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Berbagai macam kebijaksanaan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah mencakup hanya sebagian kecil daripadanya. Ia sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau dicaplok oleh negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Hasan Al-Banna sebagai ulama', pemikir dan pelopor pergerakan Islam, mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan dunia Islam. Berbagai aktifitas yang ia lakukan baik dibidang politik, sosial, budaya maupun agama semuanya mengarah pada satu tujuan, yang berjuang menegakkan Islam dalam skala regional maupun internasional.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas dapat diketahui secara singkat bahwa Al-Banna mengeluarkan statement politik yang mengarah pada satu tujuan yaitu berjuang menegakkan Islam.

Adapun masalah-masalah yang timbul berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna yang tertuang dalam karya tulisnya.
2. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna yang tertuang dalam karya tulis orang lain.
3. Bagaimana latar belakang pemikiran Hasan Al-Banna dari segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya serta agamanya.
4. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna dihubungkan dengan situasi dan kondisi Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini hanya terbatas pada pemikiran Hasan Al-Banna tentang konsep negara dan pemerintahan dalam karya tulisnya dan karya tulis orang lain sendiri yang dihubungkan dengan latar belakang dari situasi dan kondisi Mesir dan kehidupan internal keagamaannya dan hubungannya dengan Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Agar kajian ini lebih praktis dan mengarah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna tentang :
 - a. Dasar dan bentuk negara Islam.
 - b. Azas pemerintahan Islam.
2. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna dihubungkan dengan situasi kondisi Indonesia.

E. Tujuan Studi

Studi ini bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pemikiran Hasan Al-Banna tentang negara dan pemerintahan.

2. Untuk menganalisa pemikiran Hasan Al-Banna yang telah merumuskan tatanan berbangsa dan bernegara secara Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat minimal untuk :

1. Dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan sistim politik Islam.
2. Dapat dipertimbangkan dalam rangka merumuskan format politik Islam yang lebih adaptif dan fungsional terhadap perkembangan zaman.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, Adapun data yang dihimpun diambil dari karya-karya Al-Banna dan karya-karya orang lain seperti Amin Rais, Munawir Syadzali, Esposito, Kuntowijoyo an lain-lain.

Data yang diperoleh berkenaan dengan negara dideskripsikan kemudian dianalisis latar belakangnya dari segi kondisi sosial politik Mesir. Dengan demikian terwujud penelitian diskriptif yang menjelaskan tentang gambaran pemikiran Al-Banna mengenai bentuk dan dasar negara yang dihubungkan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Selanjutnya analisis tentang hal tersebut diatas.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis menguraikan bab demi bab. Dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub bab. Agar lebih jelas penulis memaparkan sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab dua ini berisi tentang Hasan Al-Banna potret pejuang pemikir muslim, yang meliputi : riwayat hidupnya dan kondisi politik pada masanya.

Bab III : Bab ketiga ini berisi pemikiran Hasan Al-Banna yang meliputi tentang dasar negara, bentuk negara dan azas pemerintah Islam.

Bab IV : Bab keempat berisi analisa yang meliputi: analisa pemikiran Hasan Al-Banna.

Bab V : Bab kelima ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.